

# Deradikalisasi di Bekasi

Konsep dan Strategi Ponpes Nurul Huda

Sebagai wilayah penyangga kota Jakarta atau hinterland, maka di Bekasi terdapat kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai daerah. Mereka yang tidak tertampung di Kota Jakarta, maka mereka menetap di Bekasi. Itulah sebabnya Bekasi menjadi sebuah wilayah yang plural dan multicultural. Berbagai paham keagamaan hidup dan berkembang di wilayah ini. Dan sebagaimana masyarakat urban baru atau new urban, maka mereka juga welcome atas siapapun yang datang di sini.

Sebagai wilayah urban, Bekasi memiliki kekhasan, yaitu masyarakatnya religious tetapi pemahaman beragamanya semakin fundamental untuk tidak menyebut radikal. Hal ini bisa dibaca dari banyak organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan yang mengusung tema-tema keagamaan fundamental, misalnya lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam Terpadu. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut mengusung pembaharuan pemikiran dan tindakan keagamaan, yaitu Islam dalam paham Salafi-Wahabi. Sekolah-sekolah Islam terpadu tersebut berafiliasi dengan Lembaga pengusung Khilafah Islamiyah yang sementara itu sudah dihentikan oleh pemerintah. HTI berada dibalik lembaga-lembaga pendidikan dimaksud. Selain itu juga berkembang boarding school yang mengusung pola pendidikan baru dalam lembaga pendidikan Islam. Boarding School dan lembaga-lembaga tahfidz kebanyakan mengusung Islam dalam pemahaman salafi.

Dalam bidang keagamaan, Bekasi juga menjadi markaz yang memberikan tempat yang nyaman bagi organisasi terlarang Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) serta Jamaah Khilafah Islamiyah. Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) selama ini menjadi organisasi yang mensuplai para pengebom bunuh diri di banyak tempat di Indonesia. Pengeboman atas gereja di Surabaya, Pengeboman Mapolres di Solo, di Bandung, Makasar dan Jakarta dilakukan oleh kelompok Jama'ah Ansharud Daulah (JAD) atau Jamaa'ah Ansharut Tauhid (JAT). Selain itu juga aktivitas organisasi Khilafah Islamiyah yang semula di Lampung dan juga berkembang di Bekasi.



f Pustaka Baitul Kilmah  
i pustakabaitulkilmah  
e pustakabaitulkilmah@gmail.com



Prof. Dr. H. Abd. Halim, M.Ag.  
Dr. H. Abd. Basyid, M.M.  
Dr. M. Choirul Arif, M. Fil. I.  
Dr. Moh. Anshori, M. Fil. I.  
H. Moh. Bashori Husain, Lc. M.A.

Kata Pengantar:  
**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.**

# Deradikalisasi di Bekasi

Konsep dan Strategi Ponpes Nurul Huda

Deradikalisasi  
di Bekasi

Konsep dan Strategi Ponpes Nurul Huda



Kata Pengantar:  
Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

# Deradikalisasi di Bekasi

Konsep dan Strategi Ponpes Nurul Huda

*Prof. Dr. H. Abd. Halim, M.Ag*

*Dr. H. Abd. Basyid, MM*

*Dr. M. Choirul Arif, M. Fil. I*

*Dr. Moh. Anshori, M. Fil. I*

*H. Moh. Bashori Husain, Lc. MA*

# Deradikalisasi Di Bekasi

## "Konsep dan Strategi Ponpes Nurul Huda"

### **Penyusun:**

Prof. Dr. H. Abd. Halim, M.Ag

Dr. H. Abd. Basyid, MM

Dr. M. Choirul Arif, M. Fil. I

Dr. Moh. Anshori, M. Fil. I

H. Moh. Bashori Husain, Lc. MA

### **Penyunting:**

Dr. H. Aguk Irawan Lc., MA

### **Cover & Layout:**

Tim Pustaka Baitul Kilmah

**ISBN: 9-786239-407001**

**Diterbitkan Oleh** Pustaka Baitul Kilmah

**Cetakan Pertama** Januari, 2024

### **Undang-Undang Republik Indonesia**

#### **Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

#### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 2:**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 72:**

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





# KATA PENGANTAR

## MENEMUKAN MODEL DERADIKALISASI DI INDONESIA

*Prof. Dr. Nur Syam, M.Si*

Terdapat perdebatan panjang dalam memahami konsep fundamentalisme, radikalisme dan ekstrimisme, termasuk juga terorisme. Perdebatan tersebut terkait dengan konsep fundamental dan radikal. Suatu konsep yang sebenarnya “positif”, yang bermakna memahami sesuatu dengan cara yang mendalam. Fundamental dapat dipahami sebagai pemahaman atas sesuatu secara mendalam, sedangkan radikal bisa dimaknai sebagai pemahaman yang sampai ke akar-akarnya atau mendasar. Keduanya merupakan diksi yang sesungguhnya positif. Berbeda dengan ekstrim dan teror yang memang memiliki dan dipahami sebagai pemahaman dan tindakan yang negative, pemahaman yang berlebihan dan bahkan cenderung merusak. (Syam, 2024).

Akan tetapi kala fundamentalisme atau radikalisme merebak, maka kata fundamental dan radikal bisa memiliki makna negative dan juga cenderung merusak. Orang yang dikategorikan sebagai kaum fundamentalisme atau radikalisme, maka sudah menjadikan pemahaman atau keyakinannya tersebut sebagai isme atau diyakini kebenarannya dan harus diupayakan untuk disebarakan atau diguna-

kan untuk melakukan Tindakan bahkan yang merusak atas yang lain. (Syam, 2024).

Dari konsep fundamentalisme atau radikalisme tersebut kemudian melahirkan konsep deradikalisasi atau sebuah proses untuk mengurangi atau bahkan menihilkan tindakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meyakini bahwa pemahaman dan perilaku tersebut benar adanya. Konsep deradikalisasi sebenarnya proyek Amerika Serikat pasca pengeboman World Trade Center (WTC), 11/09/2001 oleh mereka yang diakui sebagai bagian dari kelompok Al Qaidah di bawah kepemimpinan Usamah Bin Laden. Sebagai negara adidaya, maka proyek deradikalisasi diberlakukan untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Melalui gerakan deradikalisasi tersebut, maka pemerintah Indonesia juga menggerakkan proyek deradikalisasi baik melalui soft power maupun hard power. (Syam, 2018).

Gerakan hard power dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88), sebagai organ dari Kepolisian RI yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangkap dan mengamankan orang-orang yang terindikasi kelompok teroris. Memotong jejaringnya dan menangkap pelakunya. Melalui strategi yang jitu, maka ada orang-orang yang ditangkap dan diadili sebagai konsekuensi atas gerakan radikalnya. Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lebih banyak menggunakan strategi soft power. Di dalam praktik kerjanya, baik Densus 88 maupun BNPT bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama, lembaga pendidikan dan juga masyarakat. (Syam, nursyamcentre 2023)

Kajian ini memang “hanya” dilakukan di Kabupaten Bekasi. Namun demikian bukan berarti tidak bisa ditranferability ke wilayah

lain yang memang memiliki “kesamaan” dalam konteks berkembangnya gerakan radikalisme beragama. Bekasi merupakan wilayah yang sangat kompleks dilihat dari perkembangan radikalisme, sebab nyaris menjadi wilayah yang menjadi target area gerakan radikalisme.

Bekasi memang sebuah wilayah yang sangat plural. Berbagai macam etnis dan suku bangsa ada di sini. Semuanya eksis dan mendapatkan tempat yang memadai. Meskipun tidak secara transparan, akan tetapi semuanya nyaris berkembang. Bekasi merupakan wilayah yang sungguh welcome atas semua yang baru dan memasuki wilayahnya. Meskipun Sebagian besar penduduknya adalah kaum ahlu sunnah wal jamaah, namun dalam perkembangan berikutnya, maka berbagai aliran masuk dan berkembang.

Sebagai wilayah penyangga kota Jakarta atau hinterland, maka di Bekasi terdapat kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai daerah. Mereka yang tidak tertampung di Kota Jakarta, maka mereka menetap di Bekasi. Itulah sebabnya Bekasi menjadi sebuah wilayah yang plural dan multicultural. Berbagai paham keagamaan hidup dan berkembang di wilayah ini. Dan sebagaimana masyarakat urban baru atau new urban, maka mereka juga welcome atas siapapun yang datang di sini.

Sebagai wilayah urban, Bekasi memiliki kekhasan, yaitu masyarakatnya religious tetapi pemahaman beragamanya semakin fundamental untuk tidak menyebut radikal. Hal ini bisa dibaca dari banyak organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan yang mengusung tema-tema keagamaan fundamental, misalnya lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam Terpadu. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut mengusung pembaharuan pemikiran dan tindakan keaga-



maan, yaitu Islam dalam paham Salafi-Wahabi. Sekolah-sekolah Islam terpadu tersebut berafiliasi dengan Lembaga pengusung Khilafah Islamiyah yang sementara itu sudah dihentikan oleh pemerintah. HTI berada dibalik lembaga-lembaga pendidikan dimaksud. Selain itu juga berkembang boarding school yang mengusung pola pendidikan baru dalam lembaga pendidikan Islam. Boarding School dan lembaga-lembaga tahfidz kebanyakan mengusung Islam dalam pemahaman salafi.

Dalam bidang keagamaan, Bekasi juga menjadi markaz yang memberikan tempat yang nyaman bagi organisasi terlarang Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) serta Jamaah Khilafah Islamiyah. Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) selama ini menjadi organisasi yang mensuplai para pengebom bunuh diri di banyak tempat di Indonesia. Pengeboman atas gereja di Surabaya, Pengeboman Mapolres di Solo, di Bandung, Makasar dan Jakarta dilakukan oleh kelompok Jama'ah Ansharud Daulah (JAD) atau Jamaa'ah Ansharut Tauhid (JAT). Selain itu juga aktivitas organisasi Khilafah Islamiyah yang semula di Lampung dan juga berkembang di Bekasi. (Syam, 2022).

Organisasi Islam yang mengambil jalur Islam wasathiyah juga bergerak. NU dan Muhammadiyah, dan MUI serta organisasi lain yang memiliki pandangan Islam wasathiyah juga terus menjaga agar umat Islam yang selama ini berpandangan Islam wasathiyah tidak terus tergerus untuk memasuki pemahaman baru yang diusung oleh kaum Salafi Wahabi, bahkan juga Salafi takfiri dan Salafi Jihadis. Sebagaimana dipahami bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh kaum fundamentalis memang mengusung Islam dalam tafsir Salafisme, termasuk juga lembaga pendidikan Islam terpadu, Rumah Al Qur'an dan boarding school yang menjamur di wilayah

Bekasi. Sementara itu juga ada di antara masyarakat Bekasi yang menjalani hijrah untuk memasuki paham agama baru sebagaimana penafsiran kaum Salafi jihadis dan Salafi takfiri.

NU misalnya memiliki lembaga pendidikan yang berupa pesantren dengan berbagai varian lembaga pendidikannya. Ada yang berada di dalam pengelolaan Kementerian Agama dan ada yang berada di dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ada banyak madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan ada sekolah-sekolah umum yang berada di bawah Kemendikbudristek. Demikian pula Muhammadiyah juga memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang kebanyakan berada di bawah Kemendikbudristek. Dua organisasi ini yang dikenal sebagai pilar Islam wasathiyah di Indonesia. Selain itu juga ada lembaga-lembaga pendidikan di bawah organisasi Islam lainnya yang selaras dengan pemahaman ala Islam wasathiyah.

Pesantren yang menjadi ciri khas organisasi NU juga terus berkembang. Namun demikian, pesantren sekarang juga sudah terpilah dalam dua kategori, yaitu Pesantren Salafi dan Pesantren Salafiyah. Pesantren Salafi merupakan pesantren yang dikelola oleh komunitas Salafi dan sudah berdiri di seluruh Indonesia. Jumlahnya sudah cukup banyak dengan mengemas program Tahfidz Al Qur'an dan pendidikan modern. Pesantren seperti ini tidak memiliki legalitas sebab tidak memenuhi standart untuk mendirikan pesantren, misalnya komitmen kebangsaan, menghargai tradisi local dan toleran. Yang memperoleh izin adalah lembaga-lembaga pendidikan umumnya yang kebanyakan didapati dari Kemendikbudristek. Sama dengan sekolah di bawah koordinasi HTI, misalnya SDIT, SMPIT, SMAIT dan sebagainya juga berada di bawah Kemendikbudristek. Berbeda dengan pesantren Salafiyah yang mengusung NKRI harga Mati, ko-

mitmen kebangsaan, toleran, menghargai tradisi local dan anti kekerasan. Pesantren Salafiyah berada di bawah koordinasi NU dengan jumlah mencapai angka 39.000 pesantren. Ada pesantren yang secara structural tidak berada di bawah NU tetapi secara kultural menjadi bagian dari Islam ala *Ahli Sunnah wal Jamaah*.

Pesantren dan lembaga pendidikan di dalamnya sesungguhnya bisa menjadi benteng bagi program deradikalisasi berdasarkan pendekatan soft power. Pesantren dengan ciri khas Ahli Sunnah Wal Jamaah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki komitmen kebangsaan yang luar biasa. Yang sering meneriakkan “NKRI Harga Mati” adalah para kyai yang menjadi pimpinan pondok pesantren Salafiyah. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah merupakan orang yang tidak diragukan nasionalismenya. Mereka merupakan seorang pimpinan yang berprinsip Keislaman, Keindonesiaan dan Kemo-derenan. (Syam, 2023).

Yang sesungguhnya perlu diwaspadai adalah komunitas-komunitas yang digalang oleh kaum Anti-state. Mereka sekarang menggunakan strategi taqiyah atau menyembunyikan diri dalam pengajarannya. Komunitas Hijrah, Komunitas Hijaber, dan lain-lain sudah menjadi komunitas yang kuat. Di antaranya adalah Komunitas Yuk Ngaji. Komunitas ini memiliki strategi pengemasan dakwah yang sangat berkualitas. Ada kategorisasi pesan dakwah dan komunitas yang terseleksi secara ketat. Pada level pertama terdiri dari kelompok pemula, orang yang baru hijrah dengan pesan dakwah tentang Islam dan kehidupan sehari-hari. Jika mereka sudah lulus dan berdasarkan pengukuran yang ketat bisa menjadi bagian dari level kedua, maka mereka akan ditarik untuk masuk lebih dalam. Di sinilah seorang anggota komunitas akan mendapatkan asupan tentang Islam dan masalah-masalah bangsa, dan solusinya adalah khilafah Islam-

iyah. Jika lulus, maka akan masuk ke dalam level ketiga, dan disini materi dakwah sudah terkait dengan anti-state. (*Nur Rohman, Angga, 2023*).

Selain itu juga menggunakan strategi pendidikan melalui sekolah-sekolah unggulan dan juga pesantren yang sementara ini menjadi lembaga pendidikan yang banyak dipilih oleh masyarakat. Makanya mereka mendirikan sekolah-sekolah unggulan dengan nama yang bervariasi tetapi hakikatnya satu tata Kelola. Desain kurikulum, khususnya kurikulum agama didasarkan atas paham salafisme yang ketat. Ujung akhirnya mereka tidak mau upacara kenegaraan, menghormat bendera, anti Pancasila, anti UUD 1945 dan anti-state.

Oleh karena itu, model deradikalisasi yang ditawarkan oleh para peneliti patut untuk dicermati, yaitu deradikalisasi melalui program pendidikan dan upaya mencetak agen Islam wasathiyah. BNPT bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk bekerja sama menyelenggarakan sekolah deradikalisasi untuk mencetak agen-agen dimaksud. Program ini harus melibatkan mantan napiter yang sesungguhnya efektif dalam kerangka untuk menyadarkan betapa pemahaman beragamanya tersebut keliru dan berakibat fatal. Jika Densus 88 sudah mengambil program penangkapan yang terpapar, maka instansi pemerintah bisa bekerja sama dengan Lembaga-lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan untuk mengeliminasi radikalisme.

Tidak ada satupun model yang sempurna, maka yang diperlukan adalah sinergi model melalui kerja bersama untuk menanggulangi pengaruh gerakan salafisme yang menjadi cikal bakal gerakan-gerakan anti-state. Dan yang sungguh penting adalah diperlukan kebijak-

an yang tegas dari pemerintah di dalam menanggulangi pergerakan radikalisme. Perlu ada ketegasan standart untuk mendirikan lembaga pendidikan.

Selain itu juga harus terdapat pemahaman yang seirama bagi pengambil kebijakan. Termasuk juga pendirian pesantren, jika memang tidak memenuhi standart keindonesiaan, maka seharusnya tidak bisa berdiri. Jangan biarkan rakyat teriak-teriak sendiri, tetapi pengambil kebijakan tidak kebersamai masyarakat yang sadar adanya radikalisme.

Wallahu a'lam bi al shawab.

## **Daftar Bacaan**

- Nur Rohman, Angga. 2023. "Komunitas Yuk Ngaji: Kajian atas Pesan Dakwah dan Pemahaman Mitra Dakwah tentang Islam (Perspektif Fenomenologi Komunikasi Dakwah)". (Surabaya, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana, UIN Sunan Ampel).*
- Syam, Nur. 2007. *Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Yogyakarta, Kanisius)
- Syam, Nur. 2018. *Islam Nusantara Berkemajuan, Tantangan dan Solusi Moderasi Agama*, (Semarang; Fatawa Paublishing)
- Syam, Nur. 2024. *US Doublespeak, Islam dan Terorisme, Perspektif Analisis Wacana*. (Surabaya: Nur Syam Centre Publishing)
- Syam, Nur. 2023. *Moderasi Beragama di Indonesia: Narasi Tokoh, Islam Wasathiyah dan Islam Indonesia*. (Surabaya, Nur Syam Centre Publishing).
- Syam, Nur. "Khilafatul Muslimin Sebagai Gerakan Politik Keagamaan" dalam [nursyamcentre.com](http://nursyamcentre.com) 30/06/2022)
- Syam, Nur, "Mengkaji Pesantren Radikal" dalam [nursyamcentre.com](http://nursyamcentre.com) 17/06/2022

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II</b>	
<b>DERADIKALISASI ISLAM .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pengertian Deradikalisasi .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Saluran Deradikalisasi .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Deradikalisasi di Berbagai Negara .....</b>	<b>29</b>
<b>D. Deradikalisasi di Bekasi .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III</b>	
<b>ISLAMISASI DI NUSANTARA .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Sejarah Masuknya Islam .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Teori Islamisasi Nusantara .....</b>	<b>49</b>
<b>C. Jalur-jalur Islamisasi .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV</b>	
<b>ISLAMISASI DI BEKASI .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Sejarah Islamisasi di Bekasi .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Jejak Islamisasi di Bekasi .....</b>	<b>82</b>
<b>C. Tokoh-tokoh Islam Berpengaruh di Bekasi .....</b>	<b>88</b>
<b>D. Lembaga Pendidikan Islam di Bekasi .....</b>	<b>117</b>

<b>BAB V</b>	
<b>RAGAM EKSPRESI ISLAM BEKASI .....</b>	<b>135</b>
<b>A. Islam Moderat dan Islam Radikal .....</b>	<b>136</b>
<b>B. Islam Radikal dan Radikalisme .....</b>	<b>149</b>
<b>C. Bekasi Sebagai Kota Moderat-Toleran .....</b>	<b>156</b>
<b>D. Islam Inklusif Ponpes Nurul Huda .....</b>	<b>167</b>
<b>BAB VI</b>	
<b>BASIS RADIKALISME DI BEKASI .....</b>	<b>176</b>
<b>A. Radikalisme Berbasis Masjid .....</b>	<b>177</b>
<b>B. Radikalisme Berbasis Pesantren .....</b>	<b>198</b>
<b>BAB VII</b>	
<b>DERADIKALISASI ISLAM BEKASI .....</b>	<b>206</b>
<b>A. Aktor-aktor Deradikalisasi .....</b>	<b>206</b>
<b>B. Strategi Deradikalisasi Ponpes Nurul Huda .....</b>	<b>215</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>231</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>237</b>
<b>Hasil Survei Moderasi Beragama di Kabupaten dan Kota Bekasi .....</b>	<b>253</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

**D**eradikalisasi, sebuah konsep yang muncul sebagai tanggapan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme, menjadi semakin mendesak di berbagai wilayah, termasuk di Bekasi. Dalam konteks ini, deradikalisasi diartikan sebagai kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat akan bahaya pemahaman agama yang diselewengkan, yang dapat menyebabkan teror dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Islam, agama yang awalnya disebarkan dengan penuh cinta kasih, mengalami perubahan dalam interpretasinya seiring perkembangan zaman. Dinamika ini menciptakan paradigma baru, di mana Islam yang awalnya mengandung pesan perdamaian dan toleransi berubah menjadi Islam yang dihubungkan dengan aksi-aksi kekerasan. Paham inilah yang disebut sebagai radikalisme dan terorisme, menghadirkan tantangan serius bagi masyarakat dan pemerintah di berbagai belahan dunia, termasuk Bekasi.

Dalam menghadapi penyakit seperti radikalisme, upaya pengobatan atau deradikalisasi menjadi keniscayaan. Bekasi, sebuah kota yang tidak luput dari bayang-bayang radikalisme, menjalankan berbagai inisiatif deradikalisasi. Upaya ini tidak hanya bersifat reaktif



tetapi juga proaktif dalam mencegah munculnya paham-paham radikal di kalangan masyarakat.

Pusat deradikalisasi di Bekasi memiliki basis utama di masjid-masjid dan lembaga pendidikan pesantren. Masjid, sebagai pusat ibadah dan komunitas muslim, dianggap sebagai tempat strategis untuk menyebarkan pemahaman Islam yang moderat dan memengaruhi paham-paham radikal. Lembaga pendidikan pesantren, yang memiliki peran sentral dalam pendidikan agama, juga menjadi fokus upaya deradikalisasi, dengan memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan kedamaian.<sup>1</sup>

Inisiatif deradikalisasi di Bekasi bukanlah semata-mata tugas pemerintah, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Organisasi masyarakat seperti ormas sosial keagamaan, organisasi pemuda dan mahasiswa, serta lembaga sekolah dan pesantren, turut andil dalam upaya tersebut. Keberadaan ormas keagamaan menjadi penting karena mereka dapat berperan sebagai agen deradikalisasi di tingkat komunitas, memberikan pemahaman Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Organisasi pemuda dan mahasiswa, sebagai agen perubahan yang potensial, memiliki peran kunci dalam menyuarakan pesan deradikalisasi. Mereka dapat menjadi garda terdepan dalam membentuk pemikiran dan sikap positif di kalangan generasi muda. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan mengajarkan toleransi menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan radikalisme.

---

<sup>1</sup> Institute for Policy Analysis of Conflict, Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts, (IPAC Report No. 34, 14 December 2016): 1-20.

Lembaga sekolah dan pesantren juga memegang peran strategis dalam upaya deradikalisasi. Pendidikan yang dilakukan di lembaga-lembaga ini harus menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang toleran dan menghargai perbedaan. Kurikulum yang seimbang antara keilmuan umum dan agama, tanpa mengabaikan aspek keterbukaan dan inklusivitas, menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai deradikalisasi.

Deradikalisasi di Bekasi tidak hanya bersifat responsif terhadap kasus-kasus radikalisme yang muncul, tetapi juga proaktif dalam mencegahnya. Program-program pencegahan ini mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan dialog antarumat beragama. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk lebih memahami agama secara mendalam, sehingga mereka dapat membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang disalah artikan.<sup>2</sup>

Deklarasi Anti-Hoax dan Anti-Radikalisme yang dilakukan oleh seluruh tokoh dan pemuka agama di Kota Bekasi merupakan salah satu langkah konkret dalam menghadapi tantangan radikalisme. Dilakukan di Gedung Muzdalifah, Islamic Center Kota Bekasi, deklarasi ini mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai empat pilar kebangsaan. Selain itu, deklarasi tersebut juga menegaskan komitmen untuk melawan paham radikalisme dan terorisme, serta memelihara kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya kerjasama antar agama dalam menghadapi radikalisme tercermin dalam partisipasi aktif seluruh tokoh lintas agama yang

---

<sup>2</sup> Institute for Policy Analysis of Conflict, Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts, (IPAC Report No. 34, 14 December 2016): 1-20.

hadir dalam acara tersebut. Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, menekankan bahwa deklarasi ini bukan hanya seremonial semata, melainkan harus didasari oleh keinginan dan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan.

Begitu pula pada tahun 2018, sejumlah aktivis pemuda dan tokoh lintas agama di Kota Bekasi merespons aksi teror dengan menggelar doa bersama dan penyalaan lilin. Acara ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda, termasuk Pemuda Katolik, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), SAPMA PP, Pagar Nusa, dan OMK Gereja Katolik Santo Bartolomeus Bekasi. Di sinilah letak urgensi peran pemuda dalam gerakan deradikalisasi.<sup>3</sup>

Selain menjadi momen untuk bersatu dalam doa, acara tersebut juga menjadi wadah untuk menyuarakan deklarasi melawan paham radikalisme dan terorisme. Halason, Ketua GMNI Bekasi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan juga upaya nyata untuk melawan paham radikal dan terorisme, serta menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Deradikalisasi di Bekasi, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, menggambarkan semangat bersama dalam melawan ancaman radikalisme. Upaya ini mencakup berbagai inisiatif yang bersifat preventif, seperti pendekatan dalam kurikulum pendidikan, kegiatan sosialisasi, dialog antarumat beragama, dan deklarasi bersama. Dengan demikian, Bekasi terus berkomitmen untuk menjadi wilayah yang aman, toleran, dan sejahtera, di mana keberagaman dihargai dan dijaga sebagai kekuatan bersama.

---

3 Institute for Policy Analysis of Conflict, Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts, (IPAC Report No. 34, 14 December 2016): 1-20.

## **BAB II**

### **DERADIKALISASI ISLAM**

Bab ini memainkan peran krusial dalam mendalami dimensi-dimensi yang terkait dengan deradikalisasi. Pengertian dasar tentang konsep deradikalisasi menjadi titik awal yang esensial untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi dan mengurangi radikalisme. Deradikalisasi, sebagai suatu proses, tidak hanya melibatkan upaya pencegahan tetapi juga intervensi yang bersifat mendalam untuk mengatasi akar permasalahan radikalisme.

Saluran-saluran deradikalisasi menjadi pokok pembahasan yang tak kalah penting. Dalam konteks ini, saluran-saluran tersebut merangkum berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk mengarahkan individu yang terpapar radikalisme ke jalan yang lebih moderat dan damai. Upaya ini melibatkan pendekatan multidimensional, termasuk pendekatan pendidikan, rehabilitasi sosial, dan pemahaman agama yang benar. Dalam memahami saluran-saluran deradikalisasi, kita dapat mengidentifikasi berbagai inisiatif yang telah diambil oleh negara-negara tertentu untuk merespon tantangan radikalisme.<sup>4</sup>

---

4 Institute for Policy Analysis of Conflict, Update on Indonesian Pro-ISIS Prisoners and Deradicalisation Efforts, (IPAC Report No. 34, 14 December 2016): 1-20.

Pembandingan dengan praktek deradikalisasi di beberapa negara menjadi pendekatan yang memperkaya wawasan. Setiap negara memiliki konteks sosial, budaya, dan politik yang unik, sehingga strategi deradikalisasi yang diterapkan dapat bervariasi. Analisis terhadap praktik-praktik deradikalisasi di negara-negara tertentu memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing.

Terkait dengan konteks spesifik, pembahasan deradikalisasi di Bekasi memberikan landasan praktis dan relevan. Bekasi, sebagai bagian dari wilayah perkotaan yang dinamis dan heterogen, mungkin menghadapi dinamika radikalisme yang unik. Melalui penelusuran deradikalisasi di Bekasi, kita dapat memahami cara pihak berwenang, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat berkolaborasi untuk mengatasi potensi radikalisme. Faktor-faktor lokal seperti struktur sosial, budaya, dan ekonomi juga dapat mempengaruhi efektivitas program deradikalisasi di Bekasi.

Dengan menggali informasi mendalam tentang deradikalisasi di Bekasi, kita dapat mendapatkan wawasan yang berguna untuk meningkatkan dan merancang strategi deradikalisasi yang lebih efektif di tingkat lokal. Inisiatif yang bersumber dari masyarakat dan berbasis pada pemahaman konteks lokal cenderung lebih berhasil dalam mengatasi radikalisme.

Secara keseluruhan, bab ini tidak hanya memberikan wawasan konseptual tentang deradikalisasi, tetapi juga membuka pintu untuk mengeksplorasi berbagai implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas, khususnya di Bekasi dan konteks global yang lebih luas.